



## Sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri dalam Membangun Komunitas Masyarakat Berbasis Ketahanan Maritim di Wilayah Hukum Polres Dumai

**Henryanto Panusunan Hutasoit**  
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia  
E-mail: [henryantohutasoit69@gmail.com](mailto:henryantohutasoit69@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-03  <b>Keywords:</b> <i>Coastal Community;</i> <i>Indonesian Navy;</i> <i>Maritime Resilience;</i> <i>National Police;</i> <i>Sea Security.</i>	This study aims to analyze the dynamics of cooperation between TNI AL and Polri, identify the role of coastal communities in supporting maritime security, and examine the challenges faced in implementing this synergy. This research employs a <i>qualitative</i> method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with five respondents, consisting of TNI AL personnel, Polri officers, and representatives of the coastal community. Additionally, direct observation of joint patrol activities and socialization programs was conducted to understand the interaction patterns between security forces and local residents. Documentation was also utilized to strengthen the analysis of maritime security policies and practices implemented in the Dumai jurisdiction. The findings indicate that the synergy between TNI AL and Polri is evident in joint patrols, intelligence-sharing, and educational programs for coastal communities. However, several challenges persist, including limited operational resources, bureaucratic procedures that hinder rapid response, and low community participation in reporting illegal activities due to fear and lack of awareness. To enhance the effectiveness of this synergy, improvements are needed in maritime patrol capacity, streamlining inter-agency coordination, and empowering the community through incentives and legal protection for whistleblowers. With a more structured and sustainable strategy, maritime resilience in Dumai waters can be further strengthened to support national security stability.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Keamanan Laut;</i> <i>Ketahanan Maritim;</i> <i>Masyarakat Pesisir;</i> <i>Polri;</i> <i>TNI AL.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama antara TNI AL dan Polri, mengidentifikasi peran masyarakat pesisir dalam mendukung keamanan laut, serta mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi sinergitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah <i>kualitatif</i> dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima responden yang terdiri dari personel TNI AL, Polri, serta perwakilan masyarakat pesisir. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan patroli bersama dan program sosialisasi dilakukan untuk memahami pola interaksi antara aparat keamanan dan warga lokal. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap kebijakan dan praktik ketahanan maritim yang telah diterapkan di wilayah hukum Polres Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara TNI AL dan Polri telah terjalin dalam bentuk patroli bersama, pertukaran informasi, dan program edukasi kepada masyarakat pesisir. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya operasional, prosedur birokrasi yang menghambat respons cepat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal akibat rasa takut dan kurangnya kesadaran. Untuk meningkatkan efektivitas sinergitas ini, diperlukan peningkatan kapasitas patroli laut, penyederhanaan koordinasi antar-lembaga, serta pemberdayaan masyarakat melalui insentif dan perlindungan hukum bagi pelapor kejahatan maritim. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, ketahanan maritim di perairan Dumai dapat semakin diperkuat guna mendukung stabilitas keamanan nasional.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 99.000 kilometer dengan sekitar 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan kondisi geografis yang demikian luas, peran TNI Angkatan Laut dan Polri menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan serta

kedaulatan maritim (Cahyanto, 2021). Namun, tantangan di sektor maritim tidak hanya terkait dengan aspek pertahanan dan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pembangunan komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri sangat diperlukan guna membangun masyarakat

yang tangguh terhadap ancaman di wilayah perairan, sekaligus mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi berbasis laut (Ali & Sianturi, 2022).

Ketahanan maritim merupakan aspek penting yang mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menghadapi berbagai ancaman di sektor kelautan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam perairan Indonesia, ancaman tersebut meliputi pencurian ikan atau illegal fishing, perompakan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, adanya dinamika geopolitik dan persaingan di kawasan Indo-Pasifik turut menambah kompleksitas ancaman yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan (Iswardhana, 2023).

Peran TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun ketahanan maritim tidak hanya terbatas pada pengamanan perbatasan laut atau patroli rutin di wilayah perairan, tetapi juga melibatkan penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Dalam hal ini, sinergitas kedua institusi berfokus pada tiga aspek utama, yaitu keamanan maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan penguatan ekonomi berbasis kelautan (Moeljadi et al., 2022).

Pada aspek keamanan maritim, TNI Angkatan Laut memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, termasuk menghadapi ancaman yang bersifat militer dan non-militer. Sementara itu, Polri melalui satuan Polairud memiliki peran dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat dari tindak kriminal yang terjadi di laut. Dalam sinergitas antara kedua lembaga sangat diperlukan guna memastikan bahwa wilayah perairan Indonesia tetap aman dan kondusif bagi kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat pesisir (Munua, 2021).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi agenda penting dalam membangun ketahanan maritim yang berkelanjutan. Masyarakat pesisir, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pekerja sektor kelautan, sering kali menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi perikanan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman tentang konservasi laut (Pandoe et al., 2024). Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dan Polri secara aktif menginisiasi berbagai program sosial, edukasi,

dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan (Perwita et al., 2021).

Beberapa program yang telah diterapkan antara lain penyuluhan hukum terkait regulasi maritim, pelatihan keterampilan kelautan, serta kampanye konservasi lingkungan laut. Selain itu, melalui pendekatan berbasis komunitas, TNI Angkatan Laut dan Polri juga menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi non-pemerintah guna menciptakan ekosistem sosial yang mendukung ketahanan maritim secara menyeluruh (Ridha et al., 2024).

Dalam aspek ekonomi berbasis kelautan, sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perikanan, pariwisata bahari, serta industri maritim lainnya (Sutisna & Rofii, 2022). Salah satu tantangan utama dalam sektor ini adalah praktik penangkapan ikan ilegal serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, melalui patroli bersama serta operasi terpadu, kedua institusi ini berupaya untuk menekan aktivitas ilegal yang dapat merugikan ekosistem laut serta perekonomian masyarakat pesisir (Ritonga et al., 2024).

Sinergitas ini juga mencakup inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan diversifikasi usaha berbasis kelautan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan (Setyawati et al., 2021). Dengan adanya dukungan dari TNI Angkatan Laut dan Polri, diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Ruskar et al., 2021).

Selain pendekatan strategis dalam keamanan, pemberdayaan, dan ekonomi, sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri juga tercermin dalam kolaborasi dalam penanggulangan bencana maritim. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam seperti tsunami, badai laut, dan abrasi pantai, Indonesia memerlukan kesiapan yang optimal dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut. Dalam hal ini, kedua institusi memiliki peran penting dalam upaya tanggap darurat, penyelamatan korban, serta rehabilitasi wilayah pesisir yang terdampak bencana (Sanjiwani et al., 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi serta digitalisasi. Dalam era Industry 4.0, berbagai inovasi berbasis teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut serta keamanan perairan. Pemanfaatan sistem satellite surveillance, penggunaan kapal patroli tanpa awak, serta integrasi data berbasis big data menjadi beberapa contoh langkah strategis yang dapat diterapkan dalam mendukung ketahanan maritim. Dalam sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dapat diperkuat dengan menggandeng institusi riset dan perguruan tinggi guna mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan maritim Indonesia (Sarjito, 2025).

Membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim merupakan sebuah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama antara TNI Angkatan Laut dan Polri. Melalui sinergitas yang kuat, kedua institusi ini dapat memastikan keamanan maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Dengan pendekatan yang berbasis keamanan, pemberdayaan, ekonomi, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan ketahanan maritim Indonesia dapat semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan global di masa depan (Savitri et al., 2022).

Wilayah Dumai memiliki posisi yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Dengan karakteristik geografis yang unik ini, ancaman terhadap keamanan maritim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Permasalahan utama yang sering muncul di wilayah ini antara lain penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing, serta aktivitas perompakan yang mengancam keamanan laut dan perekonomian masyarakat pesisir. Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan maritim menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Banyak nelayan dan komunitas pesisir yang kurang memahami regulasi maritim dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman eksternal.

Dalam sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan maritim yang tangguh. Sinergitas ini bertujuan untuk memperkuat keamanan wilayah perairan Dumai melalui patroli bersama, edukasi masyarakat pesisir, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks, diperlukan upaya kolaboratif antara TNI Angkatan Laut dan Polri untuk menciptakan komunitas maritim yang mampu berpartisipasi dalam menjaga keamanan wilayah perairan mereka.

Namun, terdapat gap research atau kesenjangan penelitian dalam implementasi strategi ketahanan maritim berbasis komunitas. Banyak kajian sebelumnya lebih berfokus pada aspek kebijakan pertahanan dan keamanan laut secara makro, sementara pendekatan berbasis masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Selain itu, masih minim penelitian yang secara spesifik membahas efektivitas sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun ketahanan maritim di tingkat lokal, khususnya di wilayah Dumai yang memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi kejahatan maritim. Gap ini menjadi salah satu alasan mengapa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan masyarakat pesisir dalam mendukung ketahanan maritim serta bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan sinergi antara aparat keamanan dan warga lokal.

Urgensi dari pembahasan ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ilegal di perairan Dumai yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Sebagai kota pelabuhan yang menjadi gerbang perdagangan internasional, Dumai menghadapi risiko besar jika keamanan maritim tidak dikelola dengan baik. Kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah ini tidak hanya merugikan masyarakat setempat tetapi juga berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim. Oleh karena itu, penguatan ketahanan maritim dengan melibatkan masyarakat pesisir serta optimalisasi sinergitas antara TNI AL dan Polri menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Tanpa adanya langkah strategis yang konkret, ancaman terhadap keamanan maritim di Dumai akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan

ekonomi lokal dan merugikan kepentingan nasional.

Penelitian dan implementasi strategi berbasis komunitas dalam ketahanan maritim menjadi solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah laut mereka. Sinergitas yang kuat antara TNI AL, Polri, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem maritim yang lebih aman, stabil, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

## **II. METODE PENELITIAN**

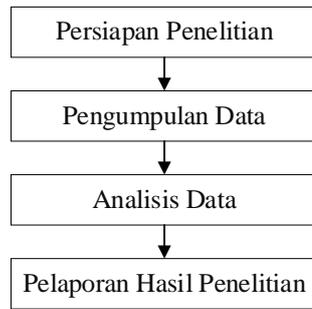
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim di wilayah hukum Polres Dumai. Metode kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam mengeksplorasi dinamika hubungan antar lembaga serta peran masyarakat dalam mendukung ketahanan maritim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima responden yang terdiri dari perwakilan TNI AL, Polri, dan masyarakat pesisir, dengan tujuan memperoleh perspektif langsung mengenai implementasi dan tantangan sinergitas dalam menjaga keamanan laut. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi kegiatan patroli bersama dan program sosialisasi kepada masyarakat pesisir untuk mengamati secara langsung interaksi antara aparat keamanan dan warga lokal. Selain itu, dokumentasi berupa laporan kegiatan patroli, kebijakan keamanan maritim, serta materi edukasi yang disosialisasikan kepada masyarakat dikumpulkan untuk memperkuat data penelitian.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, penentuan lokasi dan responden, serta pengumpulan dokumen awal yang relevan. Setelah itu, tahapan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada lima responden yang dipilih secara purposive, observasi terhadap kegiatan patroli dan interaksi antara aparat dengan masyarakat, serta dokumentasi untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul kemudian

dianalisis melalui tiga proses utama, yaitu reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi strategis terkait penguatan sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam meningkatkan ketahanan maritim di Dumai.

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam aspek ketahanan maritim di wilayah hukum Polres Dumai. Sampel penelitian terdiri dari lima orang responden yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam aspek keamanan maritim. Responden dari TNI AL adalah mereka yang memiliki pengalaman dalam tugas patroli perairan dan pengamanan wilayah laut Dumai serta memiliki peran dalam kerja sama dengan Polri. Responden dari Polri dipilih dari satuan Polairud yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengamanan perairan serta memiliki pengalaman dalam kegiatan patroli bersama dengan TNI AL. Sementara itu, responden dari masyarakat pesisir terdiri dari nelayan atau anggota komunitas pesisir yang aktif dalam kegiatan maritim dan telah mengikuti program sosialisasi atau pelatihan terkait ketahanan maritim yang diadakan oleh aparat keamanan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Dumai, yang memiliki potensi tinggi dalam aspek maritim, baik dari segi ekonomi maupun dari sisi ancaman keamanan. Dumai sebagai kota pelabuhan memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan maritim seperti penyelundupan, perompakan, dan kegiatan illegal fishing, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk penelitian terkait ketahanan maritim. Beberapa titik strategis yang menjadi fokus penelitian ini meliputi pelabuhan utama, kawasan pesisir, serta pos pengamanan terpadu yang menjadi pusat koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam menjaga keamanan perairan Dumai.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim di wilayah hukum Polres Dumai. Dengan meningkatnya ancaman kejahatan maritim seperti penyelundupan, illegal fishing, dan perdagangan manusia di perairan Dumai, dibutuhkan strategi kolaboratif antara aparat keamanan dan masyarakat pesisir untuk menjaga stabilitas wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami bagaimana pola kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan maritim serta sejauh mana keterlibatan masyarakat pesisir dalam mendukung upaya tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima responden yang dipilih secara purposive, yang terdiri dari personel TNI AL, Polri (Polairud), dan perwakilan masyarakat pesisir. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan patroli bersama dan program sosialisasi yang melibatkan aparat keamanan dan warga lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas sinergitas antar lembaga serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan maritim berbasis komunitas di Dumai.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Responden	Jabatan	Kriteria Pemilihan
1	Responden 1	Personel TNI AL	Bertugas dalam patroli maritim dan keamanan perairan Dumai
2	Responden 2	Personel TNI AL	Terlibat dalam kerja sama dengan Polri dalam operasi keamanan laut
3	Responden 3	Personel Polairud	Memiliki pengalaman dalam pengamanan wilayah perairan Dumai
4	Responden 4	Personel Polairud	Berperan dalam koordinasi dengan TNI AL untuk patroli bersama
5	Responden 5	Nelayan/Perwakilan masyarakat pesisir	Aktif dalam program edukasi dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan aparat keamanan maritim

Tabel di atas menunjukkan lima responden utama yang dipilih dalam penelitian ini. Responden terdiri dari personel *TNI Angkatan Laut* dan *Polri* yang memiliki pengalaman langsung dalam operasi keamanan laut, serta perwakilan masyarakat pesisir yang terlibat dalam program sosialisasi dan edukasi terkait ketahanan maritim. Pemilihan responden ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang beragam terkait implementasi sinergitas antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas maritim di Dumai.

#### 1. Dinamika Sinergitas TNI AL dan Polri dalam Menjaga Ketahanan Maritim di Dumai

Keamanan maritim di Dumai merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergitas erat antara *TNI Angkatan Laut* dan *Polri*, khususnya *Polairud*. Sinergitas ini mencakup patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta program edukasi kepada masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa patroli rutin dilakukan oleh TNI AL dan Polairud di beberapa titik rawan seperti jalur pelayaran internasional, kawasan pelabuhan, serta daerah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi kegiatan ilegal. Keberadaan pos pengamanan di beberapa lokasi strategis juga menjadi bentuk konkret kolaborasi kedua institusi ini dalam menjaga stabilitas perairan Dumai.

Salah satu anggota TNI AL yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa koordinasi dengan Polri telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. *"Kami selalu berkoordinasi dengan Polairud dalam setiap operasi keamanan laut. Jika ada indikasi kejahatan*

maritim, kami langsung berkomunikasi untuk menentukan langkah penindakan. Namun, tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun peralatan pendukung seperti kapal patroli dan radar pemantauan,” ungkap salah satu personel TNI AL. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa meskipun kerja sama sudah terjalin dengan baik, masih terdapat hambatan dalam hal kapasitas operasional.

Dari sisi Polri, salah satu personel Polairud menjelaskan bahwa kerja sama dengan TNI AL sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas patroli laut. “Kami sering berbagi informasi dengan rekan-rekan dari TNI AL, terutama terkait pergerakan kapal yang mencurigakan atau potensi ancaman di perairan Dumai. Namun, dalam beberapa kasus, prosedur birokrasi masih menjadi kendala, sehingga respons terhadap ancaman kadang terlambat,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerja sama yang kuat, masih terdapat tantangan dalam aspek administrasi dan koordinasi lintas institusi.

## 2. Keterlibatan Masyarakat Pesisir dalam Ketahanan Maritim

Masyarakat pesisir memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan maritim, terutama dalam hal memberikan informasi awal terkait potensi ancaman di laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini, diketahui bahwa masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang menyaksikan aktivitas mencurigakan di perairan. “Kami sering melihat kapal asing yang masuk tanpa izin atau ada perahu kecil yang beraktivitas di malam hari tanpa lampu. Namun, tidak semua nelayan berani melaporkan karena takut terkena dampaknya,” ujar seorang nelayan yang menjadi responden penelitian ini. Ketakutan ini menunjukkan bahwa masih ada kendala psikologis yang harus diatasi agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan laporan kepada aparat keamanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, TNI Angkatan Laut dan Polri telah melakukan beberapa program edukasi kepada nelayan dan komunitas pesisir. Berdasarkan

observasi yang dilakukan di salah satu sesi sosialisasi yang diadakan oleh Polairud, terlihat bahwa masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaporkan kejadian mencurigakan serta bagaimana cara menyampaikan informasi dengan aman. Salah satu anggota Polairud yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut menjelaskan, “Kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka bukan hanya pengguna laut, tetapi juga bagian dari sistem keamanan maritim. Kami menyediakan jalur komunikasi yang aman bagi nelayan agar mereka bisa melaporkan aktivitas ilegal tanpa takut,” jelasnya.

Selain itu, beberapa nelayan juga diberikan pelatihan dasar tentang keselamatan di laut dan cara mengenali tanda-tanda kapal asing yang mencurigakan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkuat peran mereka dalam mendukung keamanan maritim di Dumai.

## 3. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sinergitas

Meskipun sinergitas antara TNI AL, Polri, dan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat keamanan. Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota TNI AL, ia menjelaskan bahwa armada kapal patroli yang tersedia masih belum mencukupi untuk mengawasi seluruh perairan Dumai. “Kami hanya memiliki beberapa kapal patroli yang harus meng-cover area yang sangat luas. Ini menjadi tantangan besar karena pelaku kejahatan maritim selalu mencari celah di titik-titik yang tidak terjangkau oleh patroli,” jelasnya.

Selain itu, tantangan dalam aspek koordinasi antara TNI AL dan Polri juga masih ditemukan, terutama dalam hal birokrasi dan perbedaan prosedur operasional. Salah satu anggota Polairud mengungkapkan bahwa meskipun komunikasi antar lembaga sudah cukup baik, masih terdapat kendala administratif yang memperlambat pengambilan

keputusan. *"Ketika ada kejadian darurat, terkadang kami harus melalui beberapa tahapan administratif sebelum bisa melakukan tindakan. Ini yang sering menjadi hambatan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat,"* ujarnya.

Dari sisi masyarakat, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran sebagian nelayan terhadap pentingnya keamanan maritim. Meskipun telah dilakukan berbagai sosialisasi, masih ada kelompok nelayan yang enggan bekerja sama dengan aparat keamanan karena alasan ekonomi atau ketakutan terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan ilegal. *"Ada nelayan yang memilih diam karena takut terkena masalah, terutama jika mereka merasa bahwa melaporkan aktivitas ilegal bisa membahayakan keselamatan mereka,"* ujar salah satu tokoh masyarakat pesisir yang diwawancarai dalam penelitian ini.

#### 4. Strategi Penguatan Sinergitas dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi sinergitas ketahanan maritim, diperlukan beberapa strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja sama antara TNI AL, Polri, dan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas armada patroli dengan menambah jumlah kapal dan peralatan pengawasan seperti radar serta *drone surveillance*. Dengan adanya teknologi pemantauan yang lebih canggih, aparat keamanan dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menindak aktivitas ilegal di perairan Dumai.

Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur koordinasi antara *TNI Angkatan Laut* dan *Polri* agar respons terhadap ancaman di laut dapat dilakukan dengan lebih cepat. Salah satu personel Polairud menyarankan agar dibuat mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel, *"Jika ada jalur komunikasi cepat antara satuan patroli di lapangan tanpa harus melewati terlalu banyak prosedur administratif, maka respons terhadap ancaman bisa lebih efektif,"* ungkapnya.

Dari sisi masyarakat, perlu ada program pemberdayaan yang lebih intensif agar nelayan memiliki kesadaran dan keberanian untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan maritim. Pemberian insentif bagi nelayan yang memberikan informasi akurat tentang aktivitas ilegal bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan laut. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nelayan yang melaporkan tindakan kejahatan maritim agar mereka merasa aman dalam bekerja sama dengan aparat keamanan.

Sinergitas antara TNI AL, Polri, dan masyarakat pesisir di Dumai telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek operasional, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, diharapkan ketahanan maritim di Dumai dapat semakin kuat dan memberikan dampak positif bagi stabilitas nasional.

#### B. Pembahasan

Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun komunitas masyarakat berbasis ketahanan maritim di wilayah hukum Polres Dumai merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks. Sebagai wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional, Dumai menjadi titik rawan bagi berbagai bentuk ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama antara TNI AL, Polri, dan masyarakat pesisir menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan ketahanan maritim.

Dalam penelitian Ali dan Sianturi (2022), strategi pertahanan laut Indonesia menghadapi ancaman maritim menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas armada patroli. Penelitian ini relevan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana salah satu tantangan utama dalam sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri di Dumai adalah keterbatasan sumber daya operasional, termasuk jumlah kapal patroli dan sistem pemantauan yang masih terbatas. Selain itu, prosedur birokrasi yang menghambat respons cepat terhadap ancaman maritim juga menjadi kendala

utama, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan personel Polairud yang menyatakan bahwa proses administratif sering kali memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

Keterlibatan masyarakat pesisir dalam ketahanan maritim menjadi salah satu aspek penting yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Cahyanto (2021) dalam penelitiannya tentang Naval Base Open Day (NBOD) menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai peran strategis mereka dalam keamanan maritim. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di Dumai masih enggan melaporkan aktivitas ilegal karena takut akan dampaknya. Upaya Polairud dan TNI AL dalam melakukan sosialisasi dan memberikan jalur komunikasi aman bagi nelayan menjadi langkah positif, tetapi belum cukup efektif karena masih banyak masyarakat yang merasa kurang dilindungi secara hukum ketika melaporkan kejahatan maritim.

Dalam tata kelola maritim, Iswardhana (2023) menyoroti perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visi maritim nasional di tingkat lokal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, TNI AL, dan Polri dalam Dumai masih belum optimal. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir, baik dalam bentuk insentif ekonomi maupun perlindungan hukum bagi pelapor kejahatan maritim, masih belum berjalan secara sistematis.

Lebih lanjut, Moeljadi et al. (2022) menekankan peran intelijen maritim dalam membangun budaya maritim Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Poros Maritim Dunia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pertukaran informasi antara TNI Angkatan Laut dan Polri telah berjalan dengan baik, tetapi masih terkendala oleh mekanisme birokrasi yang lambat. Selain itu, pengawasan terhadap jalur laut di perairan Dumai masih sangat bergantung pada patroli konvensional, sementara pemanfaatan teknologi canggih seperti drone surveillence dan sistem radar masih sangat terbatas.

Dari perspektif pertahanan sosial, Pandoe et al. (2024) dalam studi kasus di Pulau Natuna menunjukkan bahwa strategi

pertahanan berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi ancaman maritim di wilayah perbatasan. Hal ini relevan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam keamanan laut, asalkan diberikan edukasi dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun ketahanan maritim di Dumai perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat, baik melalui pelatihan, insentif ekonomi, maupun kebijakan perlindungan hukum bagi pelapor.

Dari berbagai temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri di Dumai telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya, prosedur birokrasi yang menghambat respons cepat, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor utama yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah, memperkuat kapasitas operasional melalui teknologi pengawasan maritim, serta meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat pesisir dalam berpartisipasi dalam ketahanan maritim. Dengan demikian, keamanan perairan Dumai dapat lebih terjamin dan selaras dengan visi nasional dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri, khususnya Polairud, dalam menjaga ketahanan maritim di wilayah hukum Polres Dumai telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala. Kerja sama ini terwujud dalam bentuk patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta program sosialisasi kepada masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung keamanan laut, terutama melalui pelaporan aktivitas ilegal. Namun, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya operasional, hambatan birokrasi dalam koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya kesadaran dan

keberanian masyarakat untuk melaporkan ancaman maritim. Oleh karena itu, meskipun pola sinergitas ini telah menunjukkan efektivitas dalam menjaga stabilitas perairan Dumai, masih diperlukan perbaikan dalam aspek operasional, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat agar ketahanan maritim dapat semakin diperkuat.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas sinergitas dalam menjaga ketahanan maritim di Dumai, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kapasitas operasional perlu menjadi prioritas dengan menambah jumlah kapal patroli, peralatan pemantauan canggih seperti drone surveillance, serta sistem komunikasi yang lebih efisien antara TNI Angkatan Laut dan Polri. Kedua, penyederhanaan prosedur birokrasi dalam koordinasi antar-lembaga perlu dilakukan agar respons terhadap ancaman maritim dapat lebih cepat dan efektif. Ketiga, masyarakat pesisir harus lebih diberdayakan melalui program edukasi yang berkelanjutan, pemberian insentif bagi pelapor kejahatan maritim, serta perlindungan hukum bagi mereka yang berani memberikan informasi. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan sinergitas antara TNI AL, Polri, dan masyarakat pesisir dapat semakin optimal dalam menciptakan ketahanan maritim yang kuat dan berkelanjutan di wilayah perairan Dumai.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Ali, I. M., & Sianturi, D. (2022). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 372-379.
- Cahyanto, I. D. (2021). Implementasi Program Naval Base Open Day (NBOD) Di Komando Armada II. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 109-121.
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis tata kelola maritim Indonesia: Implementasi visi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 125-139.
- Moeljadi, M., Kusumaningrum, A., & Wijaya, W. W. (2022). Peran Intelijen Maritim Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia sebagai Pilar dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5785-5795.
- Munua, H. Y. (2021). Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(3), 241-262.
- Pandoe, R. M. M., Sumantri, S. H., Suwarno, P., & Widodo, P. (2024). Strategi Pertahanan Sosial dalam Menangani Isu Perbatasan Laut di Wilayah Indonesia Timur (Studi Kasus di Pulau Natuna).
- Perwita, A. A. B., Ian Montratama, S. E., & MEB, M. S. (2021). Pengelolaan Pertahanan Perbatasan Maritim Kepulauan Natuna. Jakad Media Publishing.
- Ridha, A. M., Heri, M., & Setiaji, B. T. (2024). Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 1-8.
- Ritonga, K. S., Herman, E., & Simanjorang, F. (2024). Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Ruskar, D., Hastuti, S., Wahyudi, H., Widana, I. D. K. K., & Apriyadi, R. K. (2021). Lafial: Pandemi Covid-19 sebagai momentum kemandirian industri farmasi menuju ketahanan kesehatan nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(3), 300-308.
- Sanjiwani, N. P. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (2022). Upaya diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan pilar keamanan poros maritim dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 66-85.
- Sarjito, I. A. (2025). Terminologi Pertahanan: Buku Referensi Singkatan Militer dan Keamanan. Indonesia Emas Group.
- Savitri, E. I., Wiranto, S., & Legowo, E. (2022). Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 46-53.

Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.

Sutisna, M., & Rofii, M. S. (2022). Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 1.